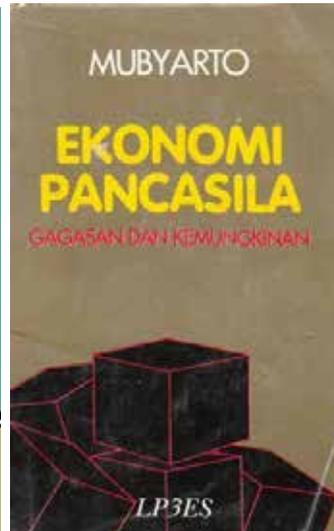
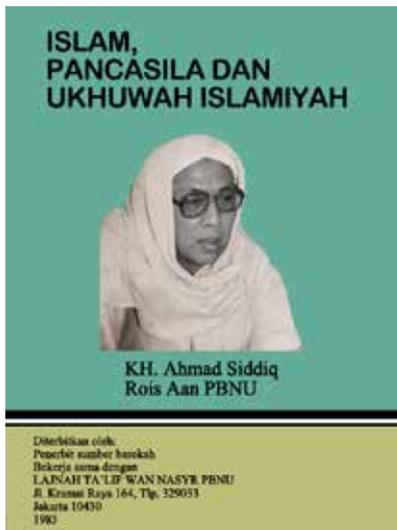


REAKTUALISASI GAGASAN PARA AGEN SEJARAH PANCASILA (Kajian Pemikiran Achmad Siddiq dan Mubyarto)



Suraji

Staff Yayasan Bani

Abdurahman Wahid

Sejarah bangsa ini mencatat keterlibatan paratokoh yang berkat kontribusinya, Pancasila sebagai falsafah negara semakin kokoh dan bisa diterima oleh masyarakat luas. Berkat tangan mereka, obor Pancasila menjadi sinar terang sebagai pemandu jalan bangsa ini. Mereka adalah para agen sejarah yang gagasan dan karyanya berkontribusi dalam memperkokoh Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagian mereka menuangkan gagasan tersebut dalam

risalah atau buku, sebagian yang lain menyampaikan gagasan melalui pidato, ceramah, atau seminar yang kemudian dibukukan. Banyak juga mereka yang menyampaikan gagasan melalui media massa, turut membangun diskursus publik tentang makna dan relevansi Pancasila.

Salah satu aktor sejarah “pembela Pancasila” yang patut dicatat adalah KH. Ahmad Siddiq (1926-1991), Rais Aam PBNU periode 1994-1989. Dia

adalah salah satu aktor penting dibalik keputusan NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Gagasan KH. Ahmad Siddiq itu dapat dilacak dalam buku berjudul “*Islam, Pancasila dan Ukhuwah Islamiyah: Wawancara dengan Rois Aam PBNU KH. Achmad Siddiq*” yang diterbitkan oleh *Lajnah Talif wan Nasyr PBNU*, Jakarta, tahun 1985. Buku tipis ini sangat berharga karena telah mendokumentasikan gagasan KH. Ahmad Siddiq pada tahap awal proses reformasi di dalam tubuh NU.

Kalau dalam tulisan maupun ceramah pada dekade sebelumnya (1970-an) spektrum pemikiran KH. Ahmad Siddiq masih seputar pentingnya menjaga tradisi dan ortodoksi agama di tengah gempuran ideologi sekuler, maka pada dekade 80-an sebagaimana terdokumentasi dalam buku ini, ia lebih tegas dan terbuka menawarkan gagasan yang terbilang progresif.¹ Dalam buku ini ia menegaskan pentingnya bersikap *tawassuth* dalam beragama, melakukan ijtihad dan berpikiran terbuka agar umat Islam mampu menjawab tantangan zaman, dan mengembangkan toleransi dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

Membaca *Islam, Pancasila dan Ukhuwah Islamiyah* akan mendapatkan penjelasan KH. Ahmad Siddiq yang terang-benderang mengenai hubungan antara Islam dan Pancasila, serta

alasanya mempertahankan dukungan terhadap asas tunggal sebagaimana diminta oleh pemerintah saat itu. KH. Ahmad Siddiq berargumentasi bahwa penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal NU bukan paksaan, tapi berdasarkan keinginan. Pancasila bukan antitesis (lawan) dari Islam, tetapi esensinya sebangun (*kongruen*) dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam masalah Islam dan Pancasila pertanyaan-pertanyaan mendasar dikemukakan: bagaimana kedudukan Pancasila di hadapan agama (Islam), bagaimana sikap umat Islam dengan Pancasila sebagai asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta implikasinya terhadap interaksi sosial umat Islam sehubungan dengan penerimaan Pancasila tersebut. Berikut ini komentar dari Ahmad Siddiq:

“Pancasila adalah ideologi dan Islam adalah agama. Ideologi, pada umumnya diartikan berkaitan dengan cita-cita, filsafat, program perjuangan, strategi, sasarannya, dan sebagainya. Tak dapat dipungkiri, karena kompleksnya hal-hal yang terkandung dalam ideologi sehingga mampu mempengaruhi watak dan tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ada yang secara berlebihan menganggap bahwa “Ideologi adalah agama.” Padahal biar bagaimanapun hebatnya ideologi ia tetap hasil pemikiran manusia tidak akan sampai ke derajat agama. Seorang pemeluk agama boleh saja berfilsafat, berideologi,

1 Greg Barton, *Islam, Pancasila and the Middle Path of Tawassuth: The Thought of Achmad Siddiq* dalam “Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia, Monash Asia Institute, Cet. I: 1996

berbudaya, berdasar negara dan sebagainya, asal ideologi dan sebagainya itu tidak bertentangan dengan ajaran agamanya, dan dapat menempatkan agama dan ideologinya (yang tidak bertentangan dengan agamanya) pada tempatnya masing-masing secara tepat. Dalam hubungan antara agama dan Pancasila, keduanya dapat sejalan, saling menunjang dan saling menguatkan. Keduanya dapat bersama-sama dilaksanakan dan diamalkan, tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang dan meninggalkan yang lainnya. Karena itu, sangat tepat kebijaksanaan pemerintah bahwa Pancasila tidak akan diagamakan dan agama tidak akan dipancasilakan. Sesungguhnya salah satu masalah besar bagi bangsa Indonesia zaman ini ialah bagaimana memproporsionalisasikan (wad'u syaiin fimahallihii).²

Tahun 1970-80an mencatat perdebatan di tubuh umat Islam sebagai mayoritas warga Indonesia tentang Pancasila. Bagi kelompok ormas atau partai politik yang mewakili aspirasi umat Islam, pemaksaan asas tunggal oleh penguasa saat itu dianggap memperlemah politik kelompok Islam di hadapan kelompok di luar Islam. Aspirasi kelompok Islam ini dijawab oleh

Soeharto dengan pembungkaman. Suara kritis yang datang dari kelompok Islam distigmatisasi sebagai kelompok ekstrem kanan yang mengancam negara. Ormas Islam terbesar NU sempat mengalami kegamangan, apakah akan menerima asas tunggal Pancasila tersebut.

Namun kegamangan itu segera mendapatkan jawaban pada momentum Mukhtar NU di Situbondo tahun 1984, karena secara resmi NU mengakui Pancasila. KH. Ahmad Siddiq tampil sebagai Rais Am dan memberikan argumentasi yang otoritatif sehingga bisa mengakhiri polemik di tubuh NU. Menurutnya, umat Islam menerima Pancasila bukan sekedar taktik melainkan ada beberapa pertimbangan. *Pertama*, umat Islam Indonesia (melalui para pemimpinnya) ikut aktif dalam perumusan dan kesepakatan tentang Dasar Negara itu. *Kedua*, secara substansial nilai-nilai luhur yang dirumuskan menjadi dasar negara itu dapat disepakati dan dapat dibenarkan menurut pandangan Islam.

Ketiga, umat Islam berkepentingan dengan memantapkan peranan agama dalam penghayatan dan pengamalan ideologi nasional dan sebaliknya melalui Pancasila, agama terhayati dan teramalkan secara lebih baik. Bukan hanya karena mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam, tetapi karena pada diri Islam sendiri memuat dan membawa nilai-nilai luhur yang bersumber pada wahyu yang dapat memberi kontribusi bagi pembangunan Nasional dan dalam Pembinaan Hukum Nasional. Bahkan

2 KH. Achmad Siddiq, *Islam, Pancasila dan Ukhuwah Islamiyah: Wawancara dengan Rais Am PBNU KH. Achmad Siddiq*, Lajnah Ta'lim wan Nasyr PBNU, Jakarta, 1985.

seperti yang pernah ditegaskan oleh Abdurrahman Wahid, proses penerimaan NU terhadap Pancasila bukan karena paksaan, melainkan karena kesadaran bernegara. Pancasila bukan bermaksud menggusur Islam, malah sebaliknya menyuburkan Islam.

Aktor intelektual lain yang layak untuk dicatat sebagai agen sejarah Pancasila adalah Mubyarto (1938-2005) dari kalangan ekonom. Ia mengabdikan dirinya sebagai dosen Universitas Gajah Mada (UGM) yang kemudian mengembangkan lembaga penelitian ekonomi pedesaan melalui Pusat Studi Ekonomi Pancasila. Karirnya sebagai birokrat ditempuh sebagai penasehat pada Departemen Perdagangan dan Bappenas pada saat itu. Gagasan Mubyarto tentang ekonomi Pancasila dapat diikuti dalam buku yang berjudul *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*. Buku ini merupakan kumpulan tulisan makalah dalam seminar atau forum ilmiah lainnya.

Sebenarnya gagasan Mubyarto yang terekam dalam buku ini bukanlah hal baru, ia hanya menegaskan dari gagasan ekonomi pendahulunya, seperti Hatta atau beberapa ekonom yang lebih senior seperti Widjojo Nitisastro dan Wilopo, bahwa ekonomi Indonesia memiliki ciri antiliberalisme. Artinya sistem ekonomi yang tidak memungkinkan eksploitasi manusia oleh manusia, tidak memperlemah kebebasan berusaha golongan ekonomi lemah, dan tidak menciptakan ketimpangan yang

besar dalam pemilikan kekayaan.³

Mubyarto hanya mengingatkan para pembuat kebijakan era Orde Baru bahwa ekonomi Pancasila merupakan sintesis dari perdebatan para *founding fathers* tentang perlunya demokrasi ekonomi. Para pendiri Republik ini melihat Barat hanya menganut demokrasi secara politik, sedangkan dalam ekonomi mereka menganut kapitalisme pasar bebas. Demokrasi ekonomi yang diharapkan para *founding fathers* juga sekaligus mengkritik sistem ala komunisme yang tidak mengakui “kepemilikan pribadi” dan kreativitas individu untuk mengembangkan diri secara ekonomi. Gagasan tentang demokrasi ekonomi ini yang kemudian coba dijelaskan oleh Mubyarto sebagai konsep “Ekonomi Pancasila”.

Mubyarto berpandangan bahwa kerangka kebijakan perekonomian yang dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang disusun tahun 1978 sebagai penjabaran terhadap UUD mengenai ciri-ciri sistem perekonomian Indonesia, memuat ciri-ciri negatif. Antara lain, *pertama*, sistem *free-fight-liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menumbuhkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia. *Kedua*, sistem *etatisme* dimana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan,

3 Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*, Jakarta: LP3ES, Cet. III, Agustus 1990, hlm. 118.

serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. *Ketiga*, pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk *monopoli* yang merugikan rakyat.⁴

Dengan pandangannya tersebut, Mubyarto melakukan kritik terhadap pemerintah Orde Baru yang ketika itu memberlakukan kebijakan pembangunanisme (*developmentalisme*) yang memberikan *priveledge* kepada modal asing dan melahirkan konglomerasi baru. Namun kritik yang disampaikan tersebut bersandar pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Jadi Pancasila dihadirkan oleh Mubyarto sebagai perangkat analisis untuk mengkritisi pemerintah. Berikut ini kritiknya:

Sudah menjadi konsensus bahwa sistem ekonomi Pancasila bukan sistem ekonomi yang liberal kapitalistik, dan juga bukan ekonomi etatistik atau serba negara. Meskipun demikian, sistem pasar tetap mewarnai kehidupan perekonomian. Oleh karena sistem ekonomi bekerja dalam konteks ekonomi pasar, maka bangunan usaha koperasi yang dikehendaki oleh UUD 1945 pasal 33 sebagai soko guru perekonomian nasional, haruslah bekerja dalam sistem pasar tersebut. Indonesia telah bereksperimendengan berbagai rupa sistem ekonomi, baik yang

menjurus ke etatisme maupun yang menjurus ke arah sistem ekonomi pasar gontokan bebas (*liberal – kapitalistik*). Sistem ekonomi yang disebut terakhir telah menghancurkan ekonomi rakyat kecil pada zaman penjajahan, yang sekaligus menciptakan *dualisme ekonomi* yang masih mewarnai perekonomian Indonesia sampai sekarang. Selanjutnya, pada dua puluh tahun pertama kemerdekaan (1945-1965), perekonomian warisan zaman kolonial terombang-ambing dalam dua sistem ekstrem, yaitu sistem liberal kapitalistik (1945-1959) dan sistem komando (1959-1965). Dan sistem ekonomi komando ternyata telah mengantarkan perekonomian Indonesia ke ambang “kebangkrutan” ekonomi yang parah.

Namun, Mubyarto tidak hanya sekedar mengkritik tanpa memberikan solusi. Dia menawarkan konsep ekonomi yang bersandarkan pada konstitusi dan Pancasila, yaitu dengan memperkuat gerakan ekonomi koperasi. Sebuah sistem perekonomian Pancasila yang berasas kekeluargaan dan patuh pada sila-sila Pancasila. Berikut ini sejumlah ciri ekonomi Pancasila yang diharapkan oleh Mubayarto:

1. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan *ekonomi*, *sosial* dan *moral*.
2. Ada kehendak kuat dari seluruh

⁴ *Ibid.*, hlm. 123-124

anggota masyarakat untuk mewujudkan keadaan pemerataan sosial (egalitarianisme), sesuai asas-asas kemanusiaan.

3. Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan ekonomi nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi.
4. Koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional.
5. Ada imbang yang jelas dan tegas antara sentralisme dan desentralisme kebijakan ekonomi, untuk menjamin keadilan ekonomi dan keadilan sosial dengan sekaligus menjaga prinsip efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.⁵

Baik Siddiq dan Mubyarto telah wafat, namun gagasannya masih tetap kontekstual dan relevan dengan era sekarang, atau tiga dekade setelah gagasan tersebut dimunculkan. Gagasan Ahmad Siddiq semakin menemukan konteksnya ketika saat ini politik identitas semakin menguat ke publik. Terdapat kelompok Islam yang menggunakan sentimen keagamaan untuk menggugat sistem demokrasi dan Pancasila, untuk digantikan dengan sistem lain seperti *khilafah*. Ada juga kelompok Islam yang menggunakan politik identitas dengan menggunakan slogan “NKRI Bersyariah” dengan tujuan melakukan *bargaining of power*. Hal ini tentu saja akan semakin memperkuat

primordialisme yang dapat mengganggu kehidupan politik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan berwawasan kebangsaan.⁶

Sementara seruan Mubyarto tiga dekade yang lalu semakin relevan saat ini ketika ekonomi Indonesia menghadapi problem kesenjangan yang sangat lebar. Gambaran dari kesenjangan tersebut misalnya bisa dilihat dari laporan dari lembaga Oxfam tahun 2016, bahwa kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia ternyata setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin. Indonesia masuk dalam enam besar negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi di dunia.⁷ Bukti jurang kesenjangan terlihat misalnya di sektor pertanian, tahun 2013 terdapat lebih 28 juta rumah tangga petani dengan rata-rata kepemilikan lahan 0,36 hektare. Ada 6,1 juta rumah tangga petani di pulau Jawa, dan 5 juta petani di luar Jawa, yang tidak punya tanah.⁸ Saat ini, terdapat 25 grup perusahaan kelapa sawit yang menguasai lahan 5,1 juta hektare atau hampir setengah pulau Jawa.⁹

Ketika Pancasila sudah diakui kemanafaatannya sebagai ideologi yang mengkritik dan mempersatukan, maka yang perlu dilakukan, meminjam istilah

5 *Ibid.*, hlm. 198-199.

6 Franz Magnis Suseno, *Memantapkan Demokrasi Pancasila, Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta (Desember 1994)

7 “Menuju Indonesia yang lebih Setara”, Laporan Oxfam tahun 2016.

8 Noer Fauzi Razhman, *Kelembagaan Baru Reforma Agraria*, harian Kompas, 16 Oktober 2014, hlm. 4

9 Tempo, *29 Taipan Sawit Kuasai Lahan Hampir Setengah Pulau Jawa*, 13 Februari 2015.

Kuntowijoyo, adalah sistematisasi nasional dengan memosisikan Pancasila sebagai ideologi terbuka, dan membuka demokrasi berpendapat. Sistem yang muncul adalah kulminasi dari interpretasi Pancasila.¹⁰ Misalnya, di bidang pendidikan, Pancasila dapat dijadikan basis praktik pendidikan dalam keluarga dan komunitas untuk memahami realitas masyarakat yang multikultural. Di bidang pembangunan, dalam konteks otonomi desa yang sekarang peran desa dalam mengelola keuangan dan sumberdaya alam semakin menguat dan komunitas desa yang mandiri, maka fungsi ideologi Pancasila yaitu menjamin berlangsungnya proses integrasi Nasional secara damai dan berkesinambungan. Tiap-tiap desa perlu diuji konsistensi dan ketahanannya, sehingga keragaman sub-kultur, perspektif dan komunal dalam desa bukan dianggap sebagai ancaman yang harus dieliminasi, melainkan sebagai faktor yang memperkaya pembangunan desa itu sendiri.¹¹

Pemahaman tentang hubungan agama dan negara, Islam dan Pancasila sebagaimana penjelasan Kyai Ahmad Siddiq, juga konsep ekonomi Pancasila yang memuat semangat kekeluargaan dan gotong royong yang dicita-citakan Mubyarto perlu diperkenalkan sejak dini.

Karena tantangan berPancasila yang sesungguhnya adalah menjadikannya tetap kontekstual dan aktual dalam mengarungi perubahan. []

Daftar Pustaka

Kuntowijoyo, *Dari Intergrasi Nasional ke Sistematisasi Nasional*, dalam *Transformasi Masyarakat Indonesia*, Cet. I Agustus 1986, Kelompok Studi Proklamasi 1986

KH. Achmad Siddiq, *Islam, Pancasila dan Ukhuwah Islamiyah: Wawancara dengan Rois Aam PBNU KH. Achmad Siddiq*, Lajnah Ta'lif wan Nasyr PBNU, Jakarta, 1985.

Greg Barton, *Islam, Pancasila and the Middle Path of Tawassuth: The Thought of Achmad Siddiq* dalam "Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia, Monash Asia Institute, Cet. I: 1996

Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*, Jakarta: LP3ES, Cet. III, Agustus 1990

Franz Magnis Suseno, *Memantapkan Demokrasi Pancasila, Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta (Desember 1994)

Hendar Putranto, *Ideologi Pancasila Berbasis Multikulturalisme: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Mitra Wacana Media, Cet. I, 2016

10 Kuntowijoyo, *Dari Intergrasi Nasional ke Sistematisasi Nasional*, dalam *Transformasi Masyarakat Indonesia*, Cet. I Agustus 1986, Kelompok Studi Proklamasi 1986, hlm. 44.

11 Hendar Putranto, *Ideologi Pancasila Berbasis Multikulturalisme: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Mitra Wacana Media, Cet. I, 2016, hlm. 189.